

OTONOMI DAERAH, KONVERGENSI INFLASI, DAN KEBIJAKAN INFLATION TARGETING DI INDONESIA

Muchamad Wahyu Hidayat¹, Diah Wahyu Ningsih², dan Rifai Afin³
Prodi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Trunojoyo Madura

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah telah terjadi konvergensi/divergensi inflasi serta seberapa cepat konvergensi/divergensi inflasi yang terjadi pada daerah observasi. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif menggunakan metode Augment Dicky-Fuller Test serta metode Panel Unit Root Test yang dikembangkan oleh Im, Pesaran, dan Shin. Data yang digunakan adalah data laju inflasi bulanan 45 kota di Indonesia mulai bulan juli 2005 hingga oktober 2015. Hasil perhitungan menggunakan metode Im, Pesaran, dan Shin menunjukkan bahwa telah terjadi konvergensi inflasi pada 45 kota yang diobservasi dalam penelitian ini. Sedangkan untuk hasil perhitungan kecepatan konvergensi menggunakan metode Augment Dicky-Fuller Test didapatkan hasil rata-rata kecepatan konvergensi nasional sebesar 5 bulan. Hasil perhitungan kecepatan konvergensi juga menunjukkan hasil bahwa 60% dari jumlah observasi memiliki kecepatan konvergensi yang lebih lambat dari rata-rata kecepatan konvergensi nasional.

Kata Kunci: Konvergensi inflasi, Inflation Targeting, Otonomi daerah.

PENDAHULUAN

Keterpurukan ekonomi global pada tahun 2008 sedikit banyak telah mempengaruhi perekonomian Indonesia yang ditandai dengan penurunan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB). Penurunan pertumbuhan ekonomi (PDB) akan berdampak pada tingkat kesejahteraan masyarakat yang semakin menurun. Selain indikator laju pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) masih banyak indikator lain yang dapat merepresentasikan bahwa kesejahteraan masyarakat semakin menurun, salah satunya adalah tingkat inflasi (Ryan, 2013). inflasi merupakan kondisi dimana harga barang dan jasa mengalami kenaikan secara umum dan terjadi terus menerus pada suatu periode waktu tertentu. Apabila harga barang dan jasa mengalami kenaikan (inflasi) maka akan berdampak pada daya beli masyarakat yang akan turun sehingga akan menurunkan tingkat kesejahteraan masyarakat dan tingkat PDB. Maka penting bagi Bank Indonesia dan pemerintah (Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah serta kementerian terkait) untuk menjaga agar tingkat inflasi di Indonesia tetap stabil. Selain pemerintah pusat, pemerintah daerah juga memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas harga/inflasi, terlebih setelah diterapkannya Undang-Undang Otonomi Daerah.

Dengan diterapkannya Undang-Undang Otonomi Daerah diharapkan pemerintah daerah juga ikut serta dalam menjaga stabilitas tingkat harga di daerahnya masing-masing. Namun dalam praktiknya banyak kebijakan pemerintah pusat dan daerah yang tumpang tindih akibat kebebasan pemerintah daerah dalam membuat kebijakannya sendiri, salah satunya dalam pengendalian tingkat inflasi di daerah. Seringkali pemerintah daerah kurang peduli terhadap

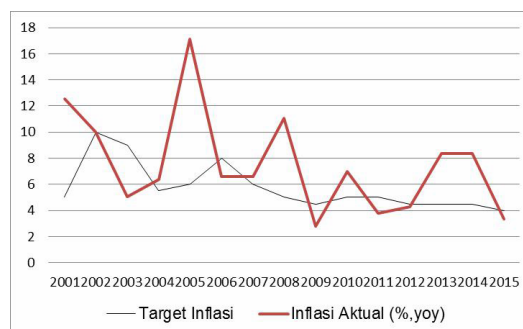
tingginya tingkat inflasi karena lebih fokus pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), kondisi keuangan pemerintah daerah (APBD), maupun Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Padahal Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Andres dan Fernando mengenai pengaruh tingkat inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi dalam Bukowski dijelaskan bahwa setiap terjadi penurunan tingkat inflasi sebesar 1% dapat menyebabkan kenaikan pertumbuhan ekonomi sebesar 0.25% sampai 2.5% (dalam Bukowski, 2006). Selain itu penelitian Fatas dan Mihov dalam Surjaningsih *et al* menyebutkan bahwa negara yang terlalu ekspansif dalam menerapkan kebijakan fiskal akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang rendah (dalam Surjaningsih *et al*, 2012). Maka dari itu sudah selayaknya pemerintah daerah juga fokus dalam mengendalikan tingkat inflasi di daerahnya agar tercipta stabilitas ekonomi secara makro di Indonesia.

Pentingnya menjaga tingkat inflasi agar tetap rendah dan stabil direspon Bank Indonesia dengan menerapkan kebijakan Inflation Targeting Framework atau biasa disebut kebijakan penargetan inflasi. Dalam menentukan target inflasi, Bank Sentral selalu menerapkan prinsip kehati-hatian, karena kredibilitas Bank Sentral akan turun jika tingkat inflasi aktual tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya. Tidak tercapainya target inflasi yang ditetapkan bisa terjadi akibat tidak adanya konvergensi inflasi di daerah akibat kebebasan pemerintah daerah dalam membuat kebijakannya sendiri.

Tidak terjadinya konvergensi inflasi dapat menimbulkan banyak kerugian baik bagi bank sentral maupun dari prefrensi pemerintah. Kerugian dari bank sentral terlihat dari kredibilitas yang semakin menurun akibat kebijakan moneter yang ditetapkan tidak dapat tercapai. Sedangkan kerugian dari prefrensi pemerintah telah dikemukakan oleh Andres dan Fernando dalam Bukowski (2006) sebelumnya. Maka dari itu selain Bank Indonesia diperlukan sinergi dengan pemerintah pusat dan daerah agar tercipta stabilitas makro ekonomi yang tercermin dari stabilitas harga barang secara umum (inflasi).

Menyikapi kondisi tersebut, maka pemerintah membentuk Tim Pengendali Inflasi (TPI) pada tahun 2005 dan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) pada tahun 2008 berkat kerja sama antara Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, serta Pemerintah Daerah. Upaya dari pemerintah melalui beberapa kementerian serta Bank Indonesia dengan membentuk tim pengendali inflasi daerah (TPID) tidak lain adalah agar terjadi konvergensi inflasi diseluruh wilayah Indonesia. Namun berdasarkan data Bank Indonesia mengenai target inflasi dan inflasi aktual pada grafik 1 di bawah ini menunjukkan hasil yang berbeda:



Sumber: Bank Indonesia (2015)

Gambar 1
Perbandingan Target Inflasi dan Aktual Inflasi

Dimana dapat dilihat bahwa sejak diterapkannya kebijakan *Inflation Targeting* pada tahun 2005 banyak target inflasi yang tidak tercapai. Target inflasi yang tercapai hanya terjadi pada tahun 2007, 2012, dan 2015 yakni dengan target sebesar 6%, 4.5%, dan 4% dengan tingkat inflasi actual 6,59%, 4,3%, 3,35%. Berdasarkan uraian diatas, terdapat permasalahan pokok yang dapat diidentifikasi menjadi sebuah pertanyaan berikut: (i) Apakah tingkat inflasi disetiap daerah sudah bergerak menuju arah yang sama (Konvergen) atau tidak (Divergen)? (ii) Seberapa besar kecepatan konvergensi atau divergensi inflasi pada tiap daerah?.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak-pihak terkait dalam hal ini pembuat kebijakan khususnya Bank Indonesia maupun pemerintah pada umumnya sebagai referensi dan pertimbangan dalam menentukan kebijakan dimasa yang akan datang. Selain itu diharapkan penelitian ini juga memberikan manfaat bagi para akademisi guna memberikan pengetahuan dan wawasan bagi pembaca, serta dapat menjadi bukti dan referensi bagi penelitian selanjutnya yang mengangkat tema mengenai kebijakan *Inflation Targeting Framework*. Bagian selanjutnya mengulas landasan teori. Bab 3 membahas metodologi penelitian yang digunakan, sementara hasil dan analisis akan diulas pada Bab 4. Bab 5 akan mengulas kesimpulan dan rekomendasi kebijakan bagi pemerintah.

TINJAUAN PUSTAKA

Inflasi dan Kebijakan Moneter

Inflasi merupakan kondisi dimana terdapat kenaikan harga barang maupun jasa yang terjadi secara umum dan terus menerus. Kenaikan dari beberapa harga barang maupun jasa belum bisa dikatakan sebagai inflasi, kecuali kenaikan harga terjadi pada sebagian besar barang-barang yang ada (Boediono, 1985). Para ekonom dari aliran moneteris berpendapat bahwa Inflasi dapat dikatakan sebagai fenomena moneter jika kenaikan harga barang dan jasa terjadi secara cepat dan terus menerus (Mishkin, 2004).

Inflasi menjadi penting karena, tingkat inflasi pada umumnya mencerminkan kondisi perekonomian negara tersebut. Dimana semakin tinggi tingkat inflasi di negara tersebut maka mengindikasikan tidak stabilnya perekonomian negara tersebut. Maka menjadi penting bagi suatu negara untuk mengontrol tingkat inflasinya agar tetap berada dilevel yang rendah dan bisa ditolerir oleh masyarakat maupun dunia usaha. Pada saat ini, banyak negara-negara di dunia yang telah memfokuskan kebijakan moneter mereka pada pengendalian tingkat inflasi atau biasa disebut dengan kebijakan *Inflation Targeting Framework*.

Terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menerapkan kebijakan moneter, diantaranya: jenis sasaran, bentuk sasaran, level sasaran, jangka waktu sasaran, dan escape clause (M.D. Aini, 2011). Sedangkan tahapan-tahapan yang harus dilakukan oleh otoritas moneter yang menerapkan kebijakan *Inflation Targeting Framework* adalah: 1) memberi tahu kepada masyarakat mengenai target inflasi yang ingin dicapai dalam jangka menengah; 2) Menjadikan stabilitas harga sebagai tujuan utama dari kebijakan moneter; 3) Menginformasikan mengenai strategi yang digunakan dalam memutuskan instrument kebijakan; 4) Meningkatkan transparansi dari kebijakan moneter; 5) Meningkatkan akuntabilitas dari bank sentral dalam mencapai sasaran inflasi (Prihadyatama, 2014).

Otonomi Daerah dan Inflasi

Otonomi daerah merupakan sebuah konsep pembagian sebagian kekuasaan yang dimiliki oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Person dalam Elwana (2013) mendefinisikan otonomi daerah sebagai pembagian kekuasaan antara pemegang kekuasaan dipusat dengan di daerah. sedangkan menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang otonomi daerah dijelaskan bahwa definisi dari otonomi daerah adalah penyerahan urusan pemerintahan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi. Dalam undang-undang juga disebutkan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Sehubungan dengan tingkat inflasi, pemerintah daerah memegang peran penting terlebih bagi negara yang menerapkan kebijakan *Inflation Targeting* seperti Indonesia. Dengan adanya desentralisasi maka kebijakan pengendalian inflasi bukan sepenuhnya dipegang oleh Bank Indonesia melainkan pemerintah daerah juga harus ikut menjaga stabilitas tingkat inflasi di daerah agar terjadi konvergensi inflasi secara nasional.

Namun dalam penerapannya tidak semudah itu, karena pada dasarnya antara pemerintah dengan otoritas moneter jelas memiliki tujuan yang berbeda seperti yang dikemukakan oleh Kent Matthews dan Jhon Thompson (2005) dalam buku "*The Economics of Banking*". Mereka menyebutkan bahwa antara pemerintah dan Bank Sentral memiliki tujuan yang berbeda, dimana pemerintah menginginkan tingkat GDP/PDRB yang lebih tinggi sedangkan Bank Sentral menginginkan tingkat inflasi yang rendah. Perbedaan tersebut dapat memicu munculnya kesenjangan tingkat inflasi di tiap- tiap daerah yang berujung pada tidak tercapainya target inflasi yang ditetapkan oleh Bank Sentral.

Konvergensi Inflasi dan Kebijakan Moneter

Negara yang menerapkan kebijakan *Inflation Targeting* berkewajiban untuk dapat memenuhi target yang telah ditetapkan. Untuk mencapai target inflasi diperlukan adanya konvergensi inflasi antar daerah / negara dalam satu kawasan tersebut. Teori mengenai konvergensi inflasi sendiri masih menjadi perdebatan dikalangan para ekonom dunia.

Beberapa ekonom yang berkontribusi dalam perdebatan tersebut adalah Harrod, Balassa dan Samuelson. Dengan mengklasifikasikan barang tradable dan non-tradable dibawah asumsi hukum paritas daya beli (PPP), mereka mempunyai hipotesis bahwa produktifitas barang *tradable* dan *non-tradable* dapat mempengaruhi perbedaan tingkat inflasi antar daerah (Afin, 2006). Terlebih untuk barang yang tidak dapat dihasilkan (*non-tradable*) atau diproduksi oleh daerah tersebut, kenaikan harga pada barang tersebut akan memicu perbedaan tingkat inflasi antara daerah pengexport barang dengan daerah pengimport barang. Sehingga perbedaan tingkat harga yang terjadi pada suatu daerah yang menerapkan mata uang tunggal kemungkinan disebabkan oleh perbedaan harga barang *non-tradable*.

Selain itu perbedaan tujuan antara pemerintah dan bank sentral dapat memicu terjadinya kesenjangan tingkat inflasi di daerah, yang berujung pada tidak terjadinya konvergensi inflasi dan tidak tercapainya target inflasi yang telah ditetapkan, Walaupun mencapai target inflasi merupakan tujuan dari Bank Sentral disemua negara yang menerapkan kebijakan *Inflation Targeting Framework*, namun teori tentang kebanksentralan menyebutkan bahwa Bank Sentral harus

mempunyai tujuan yang objektif. Maksud dari tujuan yang objektif adalah tujuan dari Bank Sentral harus mencakup stabilitas ekonomi secara keseluruhan. Namun menstabilkan tingkat output bukan menjadi beban utama bagi Bank Sentral melainkan inflasilah yang menjadi beban dan tanggung jawab dari Bank Sentral. Sedangkan pemerintah lebih memfokuskan tujuannya pada stabilitas output (Matthews and Thompson, 2005). Sehingga Bank Sentral harus lebih konservatif dalam arti harus menempatkan prioritas utama pada tujuannya yakni tingkat inflasi yang rendah, namun tetap tidak merugikan disisi output.

Penelitian Terdahulu

Elham Mohammadi (2010) dalam *A survey on the requirement of applying the framework of inflation targeting in Iran's economy* meneliti mengenai prasyarat keberhasilan penerapan kebijakan *Inflation Targeting* dan mempelajari kemungkinan pelaksanaannya di Iran. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa Iran masih belum bisa menerapkan kebijakan ITF karena masih adanya dominasi fiskal, belum ada hukum yang mengatur independensi Bank Sentral, tidak disiplinnya pemerintah dalam mengatur anggaran, dan sebagainya.

Claude Lopez dan David H. Papel (2010) dalam *Convergence of Euro Area Inflation Rates* mencoba mempelajari perilaku tingkat inflasi pada 12 negara anggota awal Uni Eropa. Hasil dari penelitian ini menunjukkan konvergensi telah terjadi tak lama setelah perjanjian Maastricht di buat hingga saat ini. Hasil ini berlaku juga pada saat krisis global tahun 2008 yang kemudian berdampak pada tiga negara anggota Uni Eropa yakni, Yunani, Spanyol, dan Irlandia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada saat krisis melanda tiga negara tersebut konvergensi inflasi masih tetap terjadi walaupun tingkat inflasi di tiga negara itu menunjukkan angka yang tinggi.

Solihin (2011) dalam "Konvergensi Inflasi dan Faktor yang Mempengaruhi: Studi Empiris di Negara-Negara ASEAN+6" mencoba mencari tahu apakah telah terjadi konvergensi inflasi pada negara-negara anggota ASEAN+6. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa telah terjadi konvergensi diantara negara anggota ASEAN+6 pada periode tahun 2000-2009. Selain itu, variabel nilai tukar dan suku bunga nominal memberikan pengaruh dalam membentuk konvergensi inflasi dikawasan tersebut. Dan faktor yang mempengaruhi tingkat inflasi dikawasan ASEAN+6 kebanyakan berasal dari variabel makroekonomi, yakni output gap, nilai tukar efektif nominal, dan suku bunga nominal.

Frita Amrita (2005) dalam "Konvergensi Inflasi dan *Optimum Currency Area* (OCA) diantara Negara ASEAN Sebelum dan Dalam Sekema AFTA". Penelitian ini mencoba mencari tahu apakah telah terjadi konvergensi inflasi pada negara anggota ASEAN selama periode sebelum dan sesudah AFTA sebagai salah satu syarat penerapan mata uang tunggal (OCA) dikawasan ASEAN. Hasil penelitian menunjukkan hasil bahwa telah terjadi konvergensi inflasi baik sebelum maupun sesudah skema AFTA dilaksanakan, serta kecepatan konvergensi inflasi yang semakin cepat sejak diterapkannya sekema AFTA.

METODE PENELITIAN

Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dalam bentuk data sekunder, dimana data yang digunakan adalah data inflasi bulanan 45 kota di Indonesia sejak bulan Juli tahun 2005 hingga Oktober 2015. Sedangkan sumber data diperoleh melalui pengumpulan data sekunder yang berasal dari Badan Pusat Statistik (BPS). Pemilihan 45 kota didasarkan pada data indeks harga konsumen

pada tahun 2005 yang hanya menjangkau tingkat inflasi 45 kota di Indonesia. Sedangkan pemilihan data dari bulan Juli tahun 2005 didasarkan pada dimulainya penggunaan kebijakan *Inflation Targeting Framework* di Indonesia.

Augment Dicky-Fuller Test

Dalam penelitian ini digunakan alat uji akar unit *Augment Dicky-Fuller Test* (*ADF Test*) dengan tujuan untuk mengetahui nilai t-statistiknya. Nilai tersebut yang kemudian akan digunakan dalam metodologi selanjutnya untuk mengetahui apakah telah terjadi konvergensi inflasi pada daerah yang diobservasi atau tidak. Dalam pengujian panel *unit root test* kali ini, penulis menggunakan metode *Augmented Dicky-Fuller Test* yang memiliki tiga alternatif model yang merupakan pengembangan dari metodologi sebelumnya yakni *Dicky-Fuller Test*. Tiga alternatif model tersebut diantaranya:

1. $\Delta \pi_t = \delta \pi_{t-1} + \varepsilon_t$
2. $\Delta \pi_t = \beta_1 + \delta \pi_{t-1} + \varepsilon_t$
3. $\Delta \pi_t = \beta_1 + \beta_2 + \delta \pi_{t-1} + \varepsilon_t$

Ketiga alternatif model memiliki hipotesis sebagai berikut:

$$H_0 : \delta = 0$$

$$H_1 : \delta < 1$$

Penentuan hipotesis tersebut diterima atau ditolak dapat dilihat dengan cara membandingkan nilai uji *t-statistic ADF* dengan *Mackinnon critical values* pada tingkat 1%, 5%, dan 10%. Jika nilai ADF lebih besar dari t-statistik secara absolut maka H_0 ditolak, yang berarti terjadi stasioneritas (*unit-root*) pada data yang diuji. Begitupun sebaliknya, jika nilai uji ADF menunjukkan nilai yang lebih kecil dari nilai *t-statistic critical value* secara absolut maka H_0 diterima yang memiliki arti bahwa tidak terjadi stasioneritas pada data yang diuji.

Dalam penelitian ini juga mencoba mencari seberapa cepat konvergensi maupun divergensi inflasi pada tiap daerah observasi. Untuk mengetahui kecepatan konvergensi inflasi tersebut dapat diturunkan langsung dari nilai δ pada model persamaan *Augment Dickey-Fuller Test* (Amrita, 2005). Nilai δ didapat dari nilai *coefficient* dari uji *Augment Dickey-Fuller Test* menggunakan aplikasi *E-views*. Untuk mengetahui data tersebut konvergen atau tidak. Sarue *et al* dalam Dekiawan menyebutkan nilainya dapat dilihat melalui nilai $\delta < 0$, sedangkan untuk mengetahui seberapa cepat konvergensi inflasi yang terjadi dapat dilihat dari nilai δ itu sendiri (Dekiawan, 2014).

Im, Pesaran, and Shin Test

Dalam penelitian ini juga digunakan metodologi *Im, Pesaran, Shin (IPS) test* sebagai alat analisis yang mendukung metodologi sebelumnya yakni *Augment Dicky-Fuller Test*. Im, Pesaran, Shin menggunakan uji alternatif berdasarkan rata-rata *unit root test* pada tingkat individu dalam setiap grup data panel. Untuk pengujian unit root test pada tingkat individu digunakan metode *ADF test* yang terpisah pada setiap data *cross section* melalui persamaan berikut:

$$\Delta \pi_{it} = \alpha \pi_{it-1} + \sum_{j=1}^p \beta_{ij} \Delta \pi_{it-j} + X'_{it} \delta + \varepsilon_{it}$$

Dengan hipotesis:

$$H_0: \alpha_i = 0 \quad \text{untuk semua } i$$
$$H_1 :$$
$$\alpha_i = 0 \quad \text{for } i = 1, 2, 3, \dots, N$$
$$\alpha_i < 0 \quad \text{for } i = N + 1, N + 2, \dots, N$$

Setelah didapat hasil estimasi dari model diatas, barulah Im Pesaran, and Shin selanjutnya menghitung rata-rata dari uji individu tersebut untuk mengetahui apakah data yang diuji memiliki kecenderungan konvergen atau divergen dengan hioptesis sebagai berikut (Im, Pesaran, and Shin. 2003):

H_0 = data yang diuji tidak stasioner

H_1 = data yang diuji stasioner

Nilai uji individu didapat dari nilai t-statistic (α_i) yang kemudian dibagi dengan jumlah observasi (N). Hasil dari perhitungan tersebut kemudian dibandingkan dengan nilai *critical value*, jika nilai perhitungan lebih besar dari nilai *critical value* secara absolut maka H_0 yang menyatakan ketidakstasioneran ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa data tersebut stasioner atau konvergen. Begitupun sebaliknya ketika hasil perhitungan rata-rata menunjukkan nilai yang lebih kecil dari nilai *critical value* secara absolut maka H_1 ditolak, yang berarti data yang diuji tidak stasioner atau divergen.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Augment Dicky-Fuller Test

Berikut hasil perhitungan metode *Augment Dicky-Fuller Test*.

Tabel 1
Hasil Uji Metode *Augment Dicky-Fuller Test*

No	Kota	ADF-test
1	Banda Aceh	-5.12565
2	Ambon	-9.06228
3	Balikpapan	-2.79501
4	Bandung	-6.22192
5	Banjarmasin	-4.36295
6	Batam	-7.4439
7	Bengkulu	-8.0308
8	Cirebon	-7.67438
9	Denpasar	-2.54468
10	Gorontalo	-9.2444
11	Jakarta	-3.51189
12	Jambi	-7.99145
13	Jayapura	-9.18525
14	Jember	-3.42789
15	Kediri	-8.69023

16	Kendari	-8.3947
17	Kupang	-2.87797
18	Bandar Lampung	-8.35695
19	Lhokseumawe	-8.53097
20	Makassar	-3.22984
21	Malang	-3.42242
22	Manado	-8.24787
23	Mataram	-3.26128
24	Medan	-8.02256
25	Padang	-7.37145
26	Padang Sidempuan	-7.12849
27	Palangkaraya	-3.37605
28	Palembang	-8.021
29	Palu	-7.79669
30	Pangkal Pinang	-8.59462
31	Pekanbaru	-6.8194
32	Pematang Siantar	-7.84693
33	Pontianak	-0.85909
34	Purwokerto	-3.6118
35	Samarinda	-7.17392
36	Sampit	-7.6043
37	Semarang	-7.27436
38	Serang	-2.66382
39	Sibolga	-3.79175
40	Surabaya	-2.91653
41	Surakarta	-4.54987
42	Tasikmalaya	-3.4421
43	Tegal	-6.99848
44	Ternate	-9.6052
45	Yogyakarta	-3.05434

Berdasarkan hasil perhitungan menggunakan metode *Augment Dicky-Fuller Test* pada tingkat level seperti yang ditampilkan dalam tabel 1 didapatkan hasil bahwa sebagian besar daerah observasi menunjukkan hasil yang stasioner dengan rata-rata probabilitas 0.0084. Namun terdapat dua kota yang memiliki hasil perhitungan yang tidak stasioner yakni Kota Pontianak dan Gorontalo dengan tingkat probabilitas yang tinggi, masing-masing sebesar 0,3417 dan 0,0112. Walaupun hasil perhitungan *ADF-Test* pada tingkat level didapat dua daerah observasi yang memiliki hasil tidak stasioner, penulis tidak melaukukan uji derajat integrasi untuk mendapatkan hasil perhitungan yang stasioner. Hal itu dikarenakan tujuan utama menggunakan metode *Augment Dicky-Fuller Test* bukan untuk mendapatkan hasil uji yang stasioner pada setiap observasi. Penggunaan metode

ADF adalah untuk mendapatkan nilai ADF t-statistik. Nilai ADF t-statistik yang didapat kemudian akan digunakan pada metodologi selanjutnya untuk dihitung nilai rata-ratanya sebelum akhirnya digunakan untuk menentukan apakah data yang diuji memiliki kecenderungan konvergen atau divergen.

Im, Pesaran, and Shin Test

Hasil perhitungan metode Im, Pesaran, and Shin menggunakan *aplikasi E-views* dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2
Hasil Uji Metode Im, Pesaran, and Shin

Prob	Average	IPS <i>critical value</i>	
		1%	5%
0.0000	-8.6111	-2,36	-2,44

Berdasarkan hasil perhitungan menggunakan aplikasi *E-views* pada tabel 2 dapat dilihat nilai rata-rata t-statistik dari 45 kota di Indonesia sebesar -8,6111, dengan nilai probabilitas sebesar 0,0000. Sedangkan nilai *critical value* yang didapat dari tabel Im, Pesaran, and Shin menunjukkan nilai sebesar -2,36 dan -2,44 pada tingkat signifikansi 5% dan 1% untuk $T > 70$ dengan *time trend*. Dengan hasil perhitungan tersebut, maka H_0 yang menyatakan ketidakstasioneran ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa tingkat inflasi 45 kota di Indonesia memiliki kecenderungan konvergensi.

Kecepatan Konvergensi

Menghitung kecepatan konvergensi inflasi bertujuan untuk mengetahui seberapa cepat konvergensi maupun divergensi inflasi pada tiap daerah observasi yang digunakan dalam penelitian ini. Berikut tabel yang menjelaskan mengenai kecepatan konvergensi inflasi pada 45 kota di Indonesia:

Tabel 3
Hasil Uji Kecepatan Konvergensi

No	Kota	Coefficient
.		
1	Banda Aceh	-0.609085
2	Ambon	-0.805596
3	Balikpapan	-0.278551
4	Bandung	-0.480549
5	Banjarmasin	-0.418920
6	Batam	-0.624813
7	Bengkulu	-0.688829
8	Cirebon	-0.649172
9	Denpasar	-0.231569
10	Gorontalo	-0.823310
11	Jakarta	-0.289261
12	Jambi	-0.682964
13	Jayapura	-0.817646

14	Jember	-0.329065
15	Kediri	-0.762213
16	Kendari	-0.731683
17	Kupang	-0.344251
18	Bandar Lampung	-0.727325
19	Lhokseuma we	-0.733685
20	Makassar	-0.368494
21	Malang	-0.285820
22	Manado	-0.720031
23	Mataram	-0.376980
24	Medan	-0.685693
25	Padang	-0.614477
26	Padang Sidempuan	-0.585999
27	Palangkar	-0.361827
28	Palembang	-0.688656
29	Palu	-0.664276
30	Pangkal Pinang	-0.754071
31	Pekanbaru	-0.546099
32	Pematang Siantar	-0.666676
33	Pontianak	-0.098335
34	Purwokerto	-0.377502
35	Samarinda	-0.591735
36	Sampit	-0.639102
37	Semarang	-0.601558
38	Serang	-0.235751
39	Sibolga	-0.588667
40	Surabaya	-0.214977
41	Surakarta	-0.556749
42	Tasikmalay	-0.301541
43	Tegal	-0.571870
44	Ternate	-0.857274
45	Yogyakarta	-0.274701
-	Tercepat	-0.098335
-	Terlama	-0.857274
-	Rata-rata	- 0.5390522

Berdasarkan tabel 3 dapat dilihat bahwa rata-rata kecepatan konvergensi inflasi 45 kota di Indonesia adalah sebesar -0,5390522 yang berarti bahwa rata-rata kecepatan konvergensi inflasi di Indonesia adalah 5 bulan. Sedangkan daerah dengan kecepatan konvergensi paling lama dimiliki oleh kota Ternate dengan nilai -0,857274 atau kecepatan konvergensinya 8 bulan. Dimana nilai tersebut lebih tinggi dari nilai rata-rata kecepatan konvergensi 45 kota lainnya. Selain Ternate masih terdapat 27 kota atau sebanyak 60% dari data yang diobservasi memiliki kecepatan konvergensi lebih lama dari rata-rata kecepatan konvergensi nasional.

Pembahasan

Bagi suatu negara yang telah menerapkan kebijakan *Inflation Targeting* untuk dapat mencapai target inflasi yang telah ditetapkan. Salah satu cara yang dapat digunakan untuk melihat keberhasilan penerapan kebijakan ini selain melihat langsung inflasi actual adalah melalui tingkat inflasi pada tiap daerah. Pergerakan inflasi yang sama antar daerah (konvergensi inflasi) akan mempermudah Bank Indonesia dalam mengendalikan tingkat inflasi secara nasional. Berdasarkan hasil perhitungan menggunakan metode Im, Pesaran, and Shin pada sub bab sebelumnya didapatkan hasil bahwa tingkat inflasi 45 kota di Indonesia telah mencapai derajat konvergensi inflasi yang relatif tinggi dengan tingkat probabilitas 0,0000. Hasil perhitungan tersebut sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Barro dan Sala-i-Martin mengenai konvergensi, dimana daerah yang tertinggal memiliki kecenderungan untuk mengejar ketertinggalan mereka dengan wilayah yang dianggap lebih maju.

Hasil perhitungan konvergensi inflasi tersebut sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Solihin (2011) mengenai konvergensi inflasi di kawasan ASEAN, dimana penelitian tersebut menunjukkan hasil bahwa telah terjadi konvergensi inflasi dikawasan ASEAN dimana didalamnya termasuk Indonesia. Selain kedua penelitian tersebut, penelitian yang dilakukan Claude Lopez dan David Papel (2010) mengenai konvergensi inflasi dikawasan Uni Eropa dapat memperkuat argumen hasil penelitian ini dimana sekalipun suatu negara maupun kawasan sedang mengalami krisis ekonomi, konvergensi inflasi masih tetap terjadi walaupun tingkat inflasi menunjukkan angka yang tinggi.

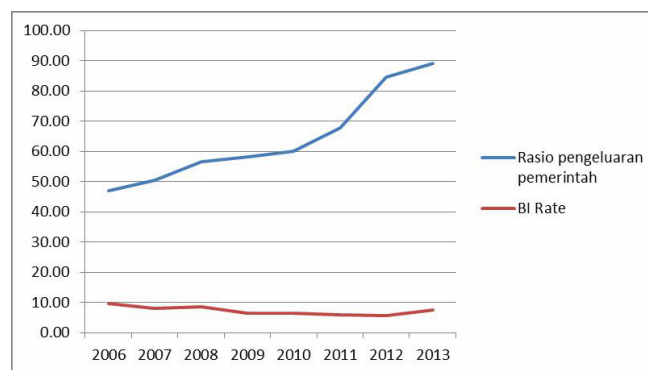
Namun yang perlu menjadi catatan adalah selain konvergensi inflasi, menghitung kecepatan konvergensi menjadi penting karena konvergensi inflasi saja tidak cukup untuk dapat menyimpulkan bahwa kebijakan ini telah berhasil diterapkan di Indonesia. Penyebabnya adalah konvergensi bisa selalu terjadi walaupun kondisi perekonomian sedang mengalami krisis seperti yang dikemukakan oleh Claude Lopez dan David Papel (2010) sehingga target inflasi yang ditetapkan oleh Bank Indonesia kemungkinan tidak akan tercapai. Maka dari itu penelitian ini mencoba menghitung kecepatan konvergensi inflasi untuk mengetahui seberapa cepat daerah-daerah dengan tingkat inflasi tinggi mengejar ketertinggalannya dengan daerah yang memiliki tingkat inflasi yang rendah dan stabil.

Berdasarkan hasil perhitungan kecepatan konvergensi pada tabel 3 didapatkan hasil bahwa rata-rata kecepatan konvergensi inflasi di Indonesia adalah sebesar -0.5390522 atau 5 bulan. Sedangkan sekitar 60% atau 28 daerah observasi menunjukkan hasil kecepatan konvergensi inflasi yang lebih lambat dari rata-rata tingkat kecepatan konvergensi nasional. Beberapa daerah dengan tingkat kecepatan konvergensi diatas 7-8 bulan adalah Manado, Lampung, Kendari, Lhoksumawe, Pangkal Pinang, Kediri, Ambon, Jayapura, Gorontalo, dan Ternate. Rata-rata daerah yang kecepatan konvergensinya lambat didominasi

oleh daerah diluar jawa seperti Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua, hanya sebagian kecil yang berasal dari pulau jawa.

Fakta mengenai masih banyaknya daerah dengan tingkat kecepatan konvergensi yang rendah kemungkinan dapat memicu tidak tercapainya target inflasi yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia. Penyebab pasti mengenai lambannya kecepatan konvergensi di daerah tidak akan dibahas lebih rinci karena penelitian ini hanya fokus untuk melihat seberapa cepat daerah dengan tingkat inflasi tinggi dan berfluktuasi akan menyusul daerah dengan tingkat inflasi rendah dan stabil. Namun jika dikaitkan dengan teori yang dikemukakan oleh Matthews dan Thompson (2005) hal tersebut bisa terjadi akibat perbedaan tujuan antara pemerintah dengan Bank Sentral. Dimana pemerintah lebih fokus pada kondisi keuangan daerah (APBD), tingkat PDB (Produk Domestik Bruto) / PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) yang lebih tinggi, dan sebagainya meskipun harus mengorbankan tingkat inflasi yang lebih tinggi.

Untuk melihat apakah pemerintah dan Bank Indonesia memiliki tujuan yang berbeda atau tidak, penulis akan menunjukkan data rasio pengeluaran pemerintah provinsi dan tingkat *BI Rate* di Indonesia. Berikut grafik yang menunjukkan data perbandingan antara rasio pengeluaran pemerintah provinsi terhadap GDP dengan tingkat *BI Rate*:



Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah)

Gambar 2
Perbandingan tingkat BI Rate dengan rasio pengeluaran pemerintah terhadap GDP

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa antara pemerintah dan Bank Indonesia masih memiliki tujuan yang berbeda sehingga menyebabkan kebijakan keduanya tidak sejalan dengan teori yang seharusnya. Kondisi tersebut terjadi pada tahun 2008 hingga 2010 serta pada tahun 2013, sedangkan pada tahun 2007, 2011 dan 2012 kebijakan yang ditempuh oleh Bank Indonesia dan pemerintah sudah sesuai dengan teori yang ada. Fakta tersebut menunjukkan bahwa antara pemerintah dan Bank Indonesia masih memiliki tujuan yang berbeda dan mengindikasikan masih adanya dominasi fiskal di Indonesia. Padahal menurut Fatas dan Mihov dalam Surjaningsih *et al* (2012) kebijakan fiskal yang terlalu ekspansif akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang rendah. Maka dari itu koordinasi antara pemerintah dan Bank Indonesia penting karena tujuan akhir dari semua kebijakan adalah untuk mensejahterakan masyarakat yang dapat dilihat dari tingkat PDB dan inflasi.

Fakta mengenai masih adanya dominasi fiskal di Indonesia dapat menyebabkan kegagalan dalam penerapan kebijakan *Inflation Targeting* seperti

penelitian yang pernah dilakukan oleh Elham Mohammadi (2010) mengenai prasyarat keberhasilan penerapan kebijakan *Inflation Targeting* di negara Iran. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa Iran belum bisa menerapkan kebijakan *Inflation Targeting* karena tidak terpenuhinya syarat untuk menerapkan kebijakan tersebut, diantaranya adalah masih adanya dominasi fiskal di Iran. Selain itu Prihadyatama (2014) juga menyebutkan bahwa syarat dari penerapan kebijakan *Inflation Targeting* adalah tidak adanya dominasi fiskal. Berdasarkan fakta diatas dapat disimpulkan bahwa walaupun konvergensi inflasi terjadi pada semua daerah observasi belum tentu kebijakan *Inflation Targeting* dapat sukses diterapkan. Hal itu dapat disebabkan karena masih terdapat dominasi fiskal baik ditingkat daerah maupun pusat seperti yang telah dijelaskan diatas.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan, serta hasil perhitungan yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka hasil penelitian mengenai otonomi daerah, konvergensi inflasi, dan kebijakan *Inflation Targeting* di Indonesia dapat disimpulkan bahwa telah terjadi konvergensi inflasi di Indonesia berdasarkan observasi di 45 kota dari tahun 2005-2015. Selain itu hasil perhitungan kecepatan konvergensi dapat disimpulkan bahwa masih terdapat dominasi fiskal pada pemerintah ditingkat daerah yang terlihat dari lambannya konvergensi inflasi di daerah. Untuk mengatasi permasalahan lambannya konvergensi inflasi di daerah, pemerintah dapat mengatasinya dengan cara lebih mengintensifkan koordinasi, baik dengan pemerintah pusat dalam hal ini Bank Indonesia melalui TPID maupun antar pemerintah daerah. Selain melakukan koordinasi untuk menjaga tingkat inflasi, pemerintah daerah juga harus mengurangi dominasi fiskal didaerahnya dengan ikut serta menjadikan target inflasi yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sebagai salah satu tujuan utama pembuatan kebijakan di daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- _____. MOU 01/M.EKON/03/2011/GBI/ DK M/NK,300-194 Tahun 2011 *tentang Koordinasi Pemantauan dan Pengelolaan Inflasi Daerah*. Jakarta.
- _____. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 *tentang Pemerintah Daerah*. Jakarta.
- _____. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2004 *tentang Bank Indonesia*. Jakarta.
- Afin, Rifai. 2006. Convergence in Price Level Among East Java's Regions. *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan*, Volume 08, Nomor 4, Maret 2006.
- Amrita, Frita. 2005. Konvergensi Inflasi dan Optimum Currency Area (OCA) diantara Negara ASEAN Sebelum dan Sesudah Sekema AFTA. *Karya Ilmiah*. Surabaya. Fakultas Ekonomi, Universitas Airlangga.
- Boediono. 1985. *Ekonomi Moneter. Edisi 3*, Yogyakarta: BPFE.
- Badan Pusat Statistik, 2015. *Indeks Harga Konsumen di 45 kota di Indonesia*. Berbagai Terbitan (2005-2015).
- Badan Pusat Statistik, 2015. *Realisasi Pengeluaran Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia Menurut Jenis Pengeluaran*. (2005-2014).
- Bukowski, Slawomir I. (2006). The Maastricht Convergence Criteria and Economic Growth in the EMU. *EconPapers*. (Online), No.24 (<http://econpapers.repec.org>) diakses 29 Maret 2016.
- Dekiawan, Hermada. (2014). Konvergensi Penerimaan dan Pengeluaran

- Pemerintah Provinsi di Indonesia: Pendekatan Data Panel Dinamis Spasial. *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan*, Volume 17, Nomor 1.
- Elwana, Yoza Ammita, 2013. Analisis Konvergensi PDRB Per Kapita Kabupaten / Kota Jawa Timur Sebelum dan Sesudah Desentralisasi. *Karya Ilmiah*. Bangkalan: Universitas Trunojoyo Madura.
- Hoang, Nam T, and Macnown, Robert F. Panel Data Unit Root Test Using Various Estimation Methods. (*Online*), (<http://spot.colorado.edu>), diakses 20 Maret 2016.
- Matthews, and Thompson. 2005. *The Economics of Banking*. Jhon Wiely & Sons. Ltd. England.
- M.D. Dita Nurul Aini. 2011. Analisis Hubungan Kausalitas Antara Nilai Tukar dan Inflasi: Implementasi Penerapan Manajemen Nilai Tukar Terhadap Pencapaian Target Inflasi. *Karya Ilmiah*. Malang: Program Sarjana Universitas Brawijaya.
- Mohamadi, Elham. 2010. A survey on the requirements of applying the framework of inflation targeting in Iran's economy. *Journal of Economics and International Finance* Vol. 3(2), pp.63-71.
- Nopirin. 1978. *Ekonomi Moneter. Edisi 1*, Yogyakarta: BPFE.
- Papel, David H and Lopez, Claude, 2010. Convergence of Euro Area Inflation Rates. *Journal of Internation Money and Finance*. Vol 31, Issue 6, Pages 1440-1458.
- Prihadyatama, Ardila. 2014. Analisis Efektivitas Instrumen Dalam Inflation Targeting Framework (IMF): Pilihan Diantara Instrumen Suku Bunga, Atau Nilai Tukar Pada Empat Negara Asia. *Thesis*. Malang: Program Pasca Sarjana Universitas Brawijaya.
- Ryan, Okta Pranata Yudha, 2013. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum, Tingkat Pengangguran Terbuka, dan Inflasi Terhadap Kemiskinan di Indonesia Tahun 2009- 2011. *Karya Ilmiah*. Semarang: Program Sarjana Universitas Negeri Semarang.
- Solihin. 2011. Konvergensi Inflasi dan Faktor-Faktor Yang Mmpengaruhi: Studi Empiris di Negara- Negara ASEAN+6. *Karya Ilmiah*. Bogor: Program Sarjana Institut Pertanian Bogor.
- Surjaningsih, Ndari, G.A Diah Utari, dan Budi Trisanto, 2012. Dampak Kebijakan Fiskal Terhadap Output dan Inflasi. *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan*, Vol 14: 389-420.
- Wilandari, Angestika, 2015. Fluktuasi Nilai Tukar dan Ekspor: Bukti Empiris di Lima Negara Pendiri ASEAN Periode 1990-2015. *Thesis*. Bogor: Program Pasca Sarjana Institut Pertanian Bogor.